

OMNIBUS LAW SEBAGAI LANDASAN HARMONISASI HUKUM DALAM BIDANG HUKUM PERDATA INDONESIA

Dr. Faizal Kurniawan, LL.M.



Realisasi Investasi
Triwulan I 2019
Di Indonesia

5 Besar Negara
Asal Investasi
selama
Triwulan I 2019

Rp 195,1 T

Investasi meningkat
5,3% dari
Triwulan I 2018
(Rp 185,3 T)

PMA
Rp 107,9 T

PMDN
Rp 87,2 T



Singapura
US\$ 1,7 M



R.R. Tiongkok
US\$ 1,2 M



Jepang
US\$ 1,1 M



Malaysia
US\$ 0,7 M



Hong Kong
US\$ 0,6 M



BKPMINDONESIA



bkpm



bkpm_id



BKPM



BKPM - Invest Indonesia

Infographic: Astri Augustine /BKPM

www.bkpm.go.id

0807 100 2576 (Contact Center)

Infographic: Ast

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi pada kuartal pertama 2019 tumbuh 5,3% menjadi Rp195,1 triliun. Capaian ini menjadi realisasi investasi terendah Indonesia dalam kurun 2014-2019. Meski tumbuh dari kuartal I 2018, namun pertumbuhannya jelas masih jauh dari target yang diharapkan pemerintah.



OMNIBUS LAW

Berasal dari kalimat Omnibus Bill. Dapat diartikan sebagai rancangan peraturan yang membahas akan banyak hal. Omnibus sendiri memiliki arti dalam bahasa latin yaitu "untuk semuanya"

Definisi OMNIBUS BILL dalam Black's Law Dictionary

A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision.

A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control

LATAR BELAKANG OMNIBUS LAW

- Dalam peningkatan iklim investasi di Indonesia ada beberapa hambatan yang terjadi salah satunya adalah terkait masalah regulasi.
- Dalam beberapa bidang industri terjadi permasalahan regulasi diantaranya adalah bidang terkait investasi
- Kebutuhan reformasi regulasi di bidang hukum privat perlu dilakukan agar tidak berimbas kepada turunnya iklim investasi di Indonesia. Terjadinya konflik dalam hukum privat salah satunya disebabkan oleh konflik regulasi. Reformasi regulasi hukum privat perlu dilakukan pemerintah dengan mengacu sistem hukum di Indonesia. Sistem Hukum Indonesia sangat menentukan arah kebijakan pemerintah. Bila sistem hukumnya baik maka arah kebijakan pemerintah akan tersistematis dan efektif.

Lanjutan...

- “Omnibus Law” adalah ekspresi yang umum digunakan. Secara umum berasal dari bahasa Latin, berarti "untuk semuanya". Omnibus dalam hal hukum berarti untuk menangani atau mencakup banyak tujuan sekaligus. Dalam konteks ini, hukum-hukum mengenai fasilitasi bisnis, perlindungan investor (baik nasional maupun asing), perlindungan kekayaan intelektual, kompetisi dan perlindungan konsumen, telah dianggap sebagai persyaratan dasar untuk perbaikan iklim usaha di Indonesia
- Gagasan konsep Omnibus Law untuk menyelesaikan permasalahan regulasi yang menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.
- Pemerintah tengah menggodok solusi perbaikan undang-undang melalui Omnibus Law.
- Keberadaan Omnibus Law sudah dikenal dalam teori-teori hukum, Teori Omnibus Law berasal dari negara yang menganut sistem hukum *Common Law*.

Lanjutan ...

- Dalam konteks UU maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum dalam berbagai UU, ke-dalam satu UU payung. Omnibus Law menjadi semacam “Kodifikasi” peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan yang mencakup berbagai peraturan.
- Dalam upaya penataan regulasi dan tata kelola peraturan perundang-undangan di Indonesia, Omnibus Law, juga dikenal dengan omnibus bill, muncul sebagai konsep yang patut dipertimbangkan sebagai solusi dari penyederhanaan regulasi.
- Secara sederhana, omnibus law merupakan metode penyusunan peraturan atau norma hukum, yang mana dalam satu peraturan akan terdapat substansi/materi untuk menegasikan norma-norma hukum sebelumnya yang tersebar dalam beberapa produk regulasi, dan ketika peraturan baru ini diundangkan maka akan mencabut materi-materi dalam peraturan sebelumnya.

PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW

- Mekanisme Omnibus law dianggap lebih efektif dan efisien dalam proses penyusunan dan revisi suatu peraturan perundang-undangan yaitu dengan penyusunan peraturan atau norma hukum, yang mana dalam satu peraturan akan terdapat substansi/materi untuk menegasikan norma-norma hukum sebelumnya yang tersebar dalam beberapa produk regulasi, dan ketika peraturan baru ini diundangkan maka akan mencabut materi-materi dalam peraturan sebelumnya
- Dalam pembentukan Omnibus law maka harus diberikan landasan hukum yang kuat sehingga tidak bertentangan dengan asas dan norma pembentukan peraturan perundang-undangan. Teknisnya bisa dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti

PROBLEMATIKA HUKUM PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW

- Kedudukan Undang undang hasil Omnibus law Dalam teori perundang undangan, kedudukan UU yang lahir dari konsep Omnibus Law ini belum diatur. Indonesia tidak menganut UU Payung yang bisa mengatur secara menyeluruh dan memiliki kekuatan terhadap aturan yang lain.
- Untuk itu dalam menerapkan konsep ini, maka harus diberikan landasan hukum yang kuat sehingga tidak bertentangan dengan asas dan norma pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Omnibus Law diharapkan adanya percepatan penyelesaian regulasi dibidang hukum privat dalam hal ini hubungan antara pemerintah dan individu: fasilitasi bisnis, perlindungan investor (asing dan nasional), perlindungan hak kekayaan intelektual, hukum persaingan dan perlindungan konsumen. Investor (asing dan nasional), perlindungan hak kekayaan intelektual, hukum persaingan dan perlindungan konsumen yang dapat menghambat iklim investasi.



OMNIBUS LAW

Secara sederhana, omnibus law merupakan metode penyusunan peraturan atau norma hukum, yang mana dalam satu peraturan akan terdapat substansi/materi untuk menegasikan norma-norma hukum sebelumnya yang tersebar dalam beberapa produk regulasi, dan ketika peraturan baru ini diundangkan maka akan mencabut materi-materi dalam peraturan sebelumnya.

Pada awal tahun 2020, pemerintah sendiri sedang menggodok RUU Omnibus Law mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

MASALAH INVESTASI DI INDONESIA

Beberapa isu yang membuat investor merasa enggan untuk berinvestasi di Indonesia, antara lain:

- Kelambatan dan keengganan legislatif dalam memberlakukan Undang-Undang terkait investasi
- Fasilitas bisnis serta perlindungan bagi investor
- Kepastian hukum akan perlindungan hak kekayaan intelektual
- Keberadaan hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang baik.

Hal-hal ini sebenarnya dapat ditanggulangi dengan cara mengharmonisasikan bidang hukum privat yang ada di Indonesia, karena saat ini banyak sekali bidang hukum privat yang berkonflik satu sama lain

OMNIBUS LAW DAN INVESTASI

- Perang dagang yang masih berlangsung antara Amerika Serikat dengan China ternyata tidak berdampak signifikan bagi Indonesia
- The Washington Post (21/7/2019), pernah melansir berita tentang rencana keluarnya 50 an lebih perusahaan multinasional dari China. Tujuan mereka adalah Vietnam, Taiwan dan beberapa negara di Asean, tidak termasuk Indonesia. Perusahaan perusahaan tersebut memandang bahwa Indonesia tidak memberikan jaminan kepastian hukum dalam bidang perijinan dan pertanahan
- Regulasi yang ada saat ini mereka nilai sangat tidak menguntungkan. Tumpang tindih peraturan, ditambah dengan lamanya perijinan keluar, serta biaya yang cukup tinggi menjadi alasan kuat untuk tidak membuka perusahaannya di Indonesia. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan resah dalam menyikapi disharmonisasi peraturan terkait perijinan diberbagai sektor tersebut. Ada 72 Undang undang yang harus dirombak terkait ijin dibidang investasi. Omnibus Law pun kemudian mencuat dari kantor Kementerian Keuangan.

Bentuk penyelesaian sengketa regulasi melalui penerapan gagasan Omnibus Law diharapkan agar iklim investasi Indonesia meningkat efektif dan efisien serta konflik dalam bidang hukum privat dalam hal ini hubungan antara pemerintah dan individu: fasilitasi bisnis, perlindungan investor (asing dan nasional), perlindungan hak kekayaan intelektual, hukum persaingan dan perlindungan konsumen. Investor (asing dan nasional), perlindungan hak kekayaan intelektual, hukum persaingan dan perlindungan konsumen yang bersumber dari permasalahan regulasi dapat diselesaikan.

INSENTIF PAJAK DI

VIETNAM
Law No. 67-2014/QH13 on Investment Law
Section 1, Article 15.1

CHAPTER III

Investment Incentives and Support

SECTION 1

Investment Incentives

Article 15. Forms and objects for application of investment incentives

1. Forms of application of investment incentives [shall comprise]:

- (a) Application of a lower rate of corporate income tax than the normal tax rate for a definite period or for the whole duration of implementation of the investment project; and exemption from and reduction of corporate income tax;
- (b) Exemption from import duty in respect of goods imported to form fixed assets; raw materials, supplies and components for implementation of an investment project;
- (c) Exemption from and reduction of land rent, land use fees and land use tax.

1. Penerapan pajak perusahaan yang rendah dalam waktu tertentu atau selama proyek investasi berjalan;
2. Pengecualian atau pengurangan pajak impor barang yang digunakan dalam proyek investasi;
3. Pengecualian atau pengurangan pajak sewa tanah, pajak dan biaya penggunaan tanah.

OMNIBUS LAW DI NEGARA LAIN

- Irlandia membuat satu Undang-Undang Omnibus Law untuk menghapus 3225 Undang-Undang.
- Filipina telah menerbitkan The Omnibus Investment Code.
- Vietnam telah melakukan teknik pembuatan Omnibus Law dalam reformasi regulasinya.

.

Omnibus Budget Recollection Act of 1993 US

Sebuah Omnibus Law yang digunakan Amerika Serikat untuk menanggulangi defisit ekonomi yang dialami saat itu.

Isi dari aturan tersebut menekankan pada gabungan dari peningkatan pajak beserta pengurangan APBN Amerika Serikat.

Beberapa isinya antara lain:

1. Pajak penghasilan dinaikkan dari 31% menjadi 36%
2. Pajak BBM ditambah 4,3 cents per gallon
3. Pemotongan budget Medicare dan militer sebesar \$255 Milyar dalam waktu 5 tahun.

Omnibus Bill di Kanada

Bill C-150: The Criminal Law Amendment
Dibuat untuk mengatur beberapa hal seperti aborsi, homoseksualitas, dan penguasaan senjata api. Diundangkan pada 1969.

Bill C-207: The Government Organization Act
Mengatur tentang perubahan struktur pemerintahan serta pembentukannya, contohnya Departemen Lingkungan. Diundangkan pada Mei 1971

Bill C-38: The Jobs, Growth, and Long-Term Prosperity Act
Dibuat untuk mengatur kebijakan budgeting Kanada pada 2012.

Tax Incentives for Foreign Investment in Vietnam

- **Tax Incentives**
- Vietnam's Law on Investment specifies three forms of incentives that are available to companies operating within the country. The following incentives are listed under Section 1, Article 15.1:
 - Application of a lower rate of corporate income tax for a certain period of time or throughout the project execution;
 - Exemption or reduction of import tax on goods imported as fixed assets on raw materials, supplies, and parts used for the project;
 - An exemption, reduction of land rents and land levy.
- *Preferential rates*
- The different preferential rates include:
 - 10 percent for the lifetime of the entire project;
 - 10 percent for 15 years from the first year of income generation;
 - 17 percent for the lifetime of the entire project;
 - 17 percent for 10 years from the first year of income generation.
- <https://www.vietnam-briefing.com/news/tax-incentives-foreign-investment-vietnam.html/>

The most often cited factors affecting the Investment market are:

- Unclear regulatory framework.
- High prevalence of corruption.
- Insufficiently developed infrastructure.
- Dominant role of state-owned enterprises (SOE).
- Lack of skilled labour.

OMNIBUS LAW SEBAGAI SOLUSI

Reformasi regulasi hukum privat perlu dilakukan pemerintah dengan mengacu sistem hukum di Indonesia. Sistem Hukum Indonesia sangat menentukan arah kebijakan pemerintah. Bila sistem hukumnya baik maka arah kebijakan pemerintah akan tersistematis dan efektif. Inilah saatnya pemerintah untuk merekonstruksi regulasi salah satunya regulasi hukum privat agar dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Akan tetapi reformasi regulasi tersebut jangan sampai mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Gagasan konsep Omnibus Law diharapkan dapat menyelesaikan konflik regulasi di bidang hukum privat dan diharapkan efektif menyelesaikan konflik regulasi yang sudah lama mendera. Untuk itu dalam menerapkan konsep ini, maka harus diberikan landasan hukum yang kuat sehingga tidak bertentangan dengan asas dan norma pembentukan peraturan perundang-undangan.

Promulgator
<ul style="list-style-type: none"> The National Assembly The Standing Committee of National Assembly The Government Prime Minister Ministerial-level agencies Other agencies
Type of Document
<ul style="list-style-type: none"> Constitution Code Law Ordinance Order Resolution Joint Resolution Decree Decision

THE NATIONAL ASSEMBLY

Number: 71/2014/QH13

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

Ha Noi , November 26, 2014

LAW

**Amending and Supplementing a Number of Articles
of the Laws on Taxes**

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

The National Assembly promulgates the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Law No. 14/2008/QH12 on Enterprise Income Tax, which was amended and supplemented under Law No. 32/2013/QH13; Law No. 04/2007/QH12 on Personal Income Tax, which was amended and supplemented under Law No. 26/2012/QH13; Law No. 13/2008/QH12 on Value-Added Tax, which was amended and supplemented under Law No. 31/2013/QH13; Law No. 45/2009/QH12 on Royalties; Law No. 78/2006/QH11 on Tax Administration, which was amended and supplemented under Law No. 21/2012/QH13; Law No. 27/2008/QH12 on Excise Tax, Law No. 45/2005/QH11 on Export Duty and Import Duty, and Law No. 54/2014/QH13 on Customs.

Article 1.

To amend and supplement a number of articles of Law No. 14/2008/QH12 on Enterprise Income Tax, which was amended and supplemented under Law No. 32/2013/QH13.

1. To amend and supplement Clause 2, Article 3 as follows:

"2. Other incomes include income from the transfer of capital or transfer of the capital-contributing rights; income from the transfer of real estate, transfer of investment projects, transfer of the right to participate in investment projects or transfer of the right to explore, exploit and process minerals; income from asset use rights or asset ownership rights, including income from intellectual property rights in accordance with law; income from the transfer, lease or liquidation of assets, including also valuable papers; income from interest or deposits, loans provided or foreign currencies sold; revenue from written-off bad debts which are now recovered; revenue from debts owed to unidentified creditors; omitted income from business activities of previous years, and other incomes.

Government proposes an omnibus law to regulate the environment

The government is proposing an omnibus law to regulate the environment — incorporating all the acts that govern environment protection, water and air.

By *Urmi Goswami*, ET Bureau | Updated: Mar 09, 2015, 05.08 AM IST



The government is proposing an omnibus law to regulate the environment — incorporating all the acts that govern environment protection, water and air.

NEW DELHI: The government is proposing an omnibus law to regulate the **environment** — incorporating all the acts that govern environment protection, water and air — that it hopes to have ready for introduction during the current session of **Parliament**.

The proposed law will not address **wildlife** protection, forests and forest conservation — the government will instead amend the existing laws to bring them up to date. Laws related to the environment, air and water were legislated over 12 years and the

attempt is to amalgamate them into a single legislation, as recommended by the Subramanian Committee, a senior official said. The ministry is seeking legal advice to consider the feasibility of a single law to regulate the environment.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Pasal 6

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pemberian insentif ini ditujukan baik bagi investor lokal maupun investor asing yang melakukan investasi di daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

4 POIN PENTING PERPRES No. 91 TAHUN 2017

Pertama, Satgas Nasional yang bertanggung jawab penuh terhadap pemantauan proses perizinan berusaha dan wajib melapor setiap bulan kepada Presiden.

Kedua, satgas Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota. Kewajibannya mengawal dan membantu penyelesaian setiap perizinan berusaha, mengidentifikasi perizinan yang perlu direformasi (dimudahkan atau distandarisasi), dan melaporkan semua kegiatan berusaha dan permasalahannya kepada satgas Nasional.

Ketiga, Leading Sector adalah satgas yang paling bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengembangan, dan pelayanan perizinan berusaha suatu sektor atau urusan.

Keempat, satgas pendukung adalah yang wajib mendukung perizinan yang diperlukan oleh Leading Sector untuk penyelesaian suatu investasi/berusaha.

***CUKUPKAH PERATURAN-
PERATURAN DIATAS?***

PERLUKAH OMNIBUS LAW?



KELEBIHAN & KELEMAHAN

Beberapa kelebihan penerapan konsep Omnibus Law dalam menyelesaikan sengketa regulasi di Indonesia antara lain:

1. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien.
2. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
3. Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
4. Mampu memutus rantai birokrasi menjadi sederhana;
5. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu
6. Adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Sedangkan kelemahan penerapan konsep ini bila diterapkan antara lain:

1. Membuka peluang akan ditolak pada saat paripurna atau di judicial review terhadap kebijakan omnibus regulation yang diterbitkan;
2. Akan mempengaruhi stabilitas sistem hukum nasional akibat orientasi kebijakan pemerintah yang berubah sesuai kehendak rezim yang memerintah.

Kualitas Lembaga Pengadilan **)

Penegakan Kontrak	145
Nilai (skala 0-100)	47,23
Waktu	403 hari
Biaya	70,3% dari nilai klaim
Indeks kualitas proses pengadilan	7,9 (skala 0-18)
Penyelesaian Kepailitan	38
Nilai (skala 0-100)	67,61
Waktu	1,1 tahun
Biaya	21,6% dari harta

Keterangan: *)Kepailitan di luar permohonan pembatalan perdamaian.

**)Berdasarkan laporan Bank Dunia

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Doing Business 2018 Reforming to Create Jobs, diolah

Indeks Kemudahan Berusaha 2018

Indikator	Peringkat
Memulai berusaha	144
Izin mendirikan bangunan	108
Akses listrik	38
Pendaftaran properti	106
Mendapatkan pinjaman	55
Hak pemegang saham minoritas	43
Membayar pajak	114
Perdagangan lintas negara	112
Penegakan kontrak	145
Penyelesaian kepailitan	38

Bisnis/Amri Hidayat

SELAMAT BERDISKUSI